

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Peneliti Terdahulu**

Peneliti melakukan penelitian yang didukung dari hasil peneliti terdahulu yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam PHBS Melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat terhadap Partisipasi Masyarakat dalam PHBS. Hasil penelitian terdahulu akan disesuaikan dengan hasil lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan demikian, hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Title	Author	Doi	Hasil penelitian
1	Pengolahan Sampah Rumah Tangga Berbasis Partisipasi Aktif dari Masyarakat Melalui Penerapan Metode 4RP untuk Menghasilkan Kompos	Buhani1*, Riko Noviadi2, Suharso	<a href="http://dx.doi.org/10.23960/jss.v2i1.84">http://dx.doi.org/10.23960/jss.v2i1.84</a>	Secara umum, kegiatan PKW telah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap paradigma pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat yang akan mendukung peningkatan daya saing wilayah, melalui peningkatan sumber daya wilayah seperti peningkatan pengelolaan tanaman pertanian dan perkebunan. Kegiatan PKW ini juga telah berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, produktivitas, dan kesehatan dengan terlaksananya kegiatan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Hasil

2	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	Mamah Halimah, Hetty Krisnani, & Muhammad Fedryansyah	<a href="https://doi.org/10.24198/share.v5i1.13120">https://doi.org/10.24198/share.v5i1.13120</a>	Dalam suatu program pemerintahan akan berhasil apabila masyarakat juga ikut berpartisipasi. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam tercapainya keberhasilan program. Karena apabila melibatkan warga masyarakat, maka masyarakat akan sadar bahwa program yang dibuat merupakan program yang penting untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri.
3	Implementasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kecamatan Kasemen Kota Serang	Jessica Lofty Angelique 1*, Rethorika Berthanila 1, Ahmad Sururi 1	<a href="https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10975">https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10975</a>	bahwa implementasi program Sanimas belum berjalan dengan baik karena belum meratanya akses air bersih bagi seluruh masyarakat di Kasemen, minimnya peran serta masyarakat secara langsung dalam melaksanakan program

4	<p>PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENCAPAI WILAYAH SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KECAMATAN TANJUNGPANG BARAT KOTA BANDAR LAMPUNG</p>	<p>Mei Ahyanti1*, Prayudhy Yushananta2, Ahmad Fikri3, Sarip Usman4, Novita Rudiyaniti5, M. Ridwan6 1-6Poltekkes</p>	<p><a href="https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i3.5566">https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i3.5566</a></p>	<p>kegiatan pengabdian selanjutnya mengakomodir permintaan dari masyarakat yaitu pelatihan lanjutan bagi para pengrajin sampah dan pengelola bank sampah dan melakukan pelatihan tambahan yaitu penyediaan bahan makanan sayur dari halaman sendiri dengan memanfaatkan media tanam menggunakan barang bekas.</p>
5	<p>PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) UNTUK MERUBAH PERILAKU HIDUP SEHAT DI KELURAHAN KASUNYATAN KOTA SERANG PROVINSI BANTEN</p>	<p>Titi Stiawati</p>	<p><a href="https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3607">https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3607</a></p>	<p>Pada penataan sanitasi berbasis di Kelurahan Kasunyatan selalu melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana penataan sanitasi berbasis dimana perencanaan penataan sanitasi berbasis ini merupakan suatu bentuk kerjasama oleh masyarakat dan</p>

				pemerintah Kota Serang dalam menyelenggarakan penataan sanitasi berbasis, dan menjadi satu kesatuan dengan perencanaan pembangunan Kota Serang, khususnya penataan kawasan kumuh. Partisipasi
--	--	--	--	---

Tabel penelitian terdahulu beirsikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai tolak ukur, acuan ataupun referensi dasar untuk peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat sebagai penyempurna hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian-penelitian tersebut ada yang secara khusus membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam PHBS melalu program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM.

## 2.2 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dipandang sebagai ilmu dan disiplin akademis. Kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu, kelompok, dan masyarakat. Kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya. Upaya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No. 11, 2009). Upaya kesejahteraan sosial ada guna untuk membantu masyarakat untuk memulihkan keberfungsian sosial mereka.

Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, taraf hidup yang dimaksud merupakan hal yang tidak diukur secara

ekonomi maupun fisik saja, melainkan menata kehidupan sosial dan kebutuhan spiritual manusia. Kesejahteraan sosial merupakan sebuah kondisi dimana manusia secara individu maupun masyarakat dalam konteks kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup masyarakat.

Konsep kesejahteraan sosial juga membicarakan beberapa konsep yang berkaitan diantaranya terdapat konsep dalam dua pengertian yaitu secara luas dan secara sempit. Di dalam pengertian kesejahteraan sosial dan kaitannya dengan konsep terdapat juga hubungannya antara kesejahteraan sosial dengan pekerjaan sosial. Pembahasan konsep kesejahteraan sosial kali ini peneliti akan membahas: pengertian kesejahteraan sosial, keberfungsian sosial, pekerjaan sosial, dan pelayanan sosial.

### **2.2.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial merupakan suatu konsep yang mempunyai arti yang sangat luas. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjukkan pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Adapun konsep kesejahteraan sosial menurut Friedlander yaitu:

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya. (Fahrudin, 2014, p. 9)

Kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir dalam suatu lembaga dan pelayanan sosial sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan cara meningkatkan kemampuan individu dan kelompok baik dalam memecahkan masalahnya maupun dalam memenuhi kebutuhannya.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan yang terorganisir dan dinamis dengan segala keterampilan ilmiah, yang berusaha mengembangkan metodologi dari aspek strategi dan teknis

untuk menangani masalah sosial dengan bertujuan membantu individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan sosial adalah:

Suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. (Suharto, 2014, p. 1)

Kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisir yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki tujuan untuk mencegah dan membantu mengatasi masalah sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangannya adalah keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, ataupun keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Kesejahteraan sosial merupakan ilmu terapan, ilmu yang saling meminjam dari disiplin ilmu lain, seperti psikologi, antropologi, hukum, ekonomi dan disiplin ilmu lainnya. Kesejahteraan sosial memiliki tiga kerangka nilai, meliputi Body of knowledge (kerangka pengetahuan), Body of value (kerangka nilai) dan Body of skills (kerangka keterampilan). Definisi Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh Lembaga, lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu. Suharto (2010:3)

Kesejahteraan sosial adalah suatu lembaga sosial yang beraktifitas atau yang berperan penting dalam mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusinya dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh setiap individu, kelompok, maupun masyarakat.

### **2.2.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan harus kita bedakan dengan sejahtera. Karena sejatinya kata sejahtera lebih identik dengan pemberian bantuan kepada masyarakat berbentuk uang seperti salah satunya

pemberian jaminan sosial. Sedangkan, kesejahteraan sosial pasti berhubungan dengan pekerja sosial. Adapun kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mencapi kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. (Fahrudin, 2014, p. 10)

Tujuan kesejahteraan sosial berfokus pada pencapaian kehidupan pokok setiap orang yang mencakup kebutuhan ekonomi, fisik, ekonomi, sosial, serta penyesuaian diri terhadap taraf hidup yang memuaskan bagi kehidupan sehari-hari sehingga kesejahteraan bisa dicapai oleh setiap orang.

### **2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial memiliki fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)  
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)  
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
3. Fungsi Pengembangan (*Development*)  
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)  
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. Friedlander dan Apte (Fahrudin, 2014, p. 14)

Fungsi-fungsi tersebut berusaha dicapai untuk mengurangi tekanan dan mencegah munculnya masalah sosial baru. Secara kompleks fungsi-fungsi kesejahteraan sosial masing-masing fungsinya memiliki fokus tersendiri. Pada fungsi pencegahan ditujukan untuk memperkuat setiap orang untuk terhindar dari masalah baru.

#### 2.1.4 Pendekatan Kesejahteraan Sosial

Pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial merupakan hal yang penting bagi penunjang pelaksanaan aktivitas keilmuan dan praktik kesejahteraan sosial. Pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1. Filantropi sosial  
Filantropi terkait erat dengan upaya-upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan para agamawan dan relawan, yakni upaya yang bersifat amal (*charity*) dimana orang-orang ini menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. pelaku dari filantropi ini disebut dengan filantropis.
2. Pekerjaan sosial  
Berbeda dengan pendekatan yang sebelumnya yaitu filantropi pekerjaan sosial disini merupakan pendekatan yang teroganisir untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan tenaga professional yang memenuhi syarat untuk menangani masalah sosial. Perkembangan pekerjaan sosial sendiri juga tidak lepas dari adanya filantropi. Pada abad ke-19 pekerjaan sosial telah mengalami pengembangan professional dan akademik yang cukup pesat dan telah menyebar di seluruh dunia.
3. Administrasi sosial  
Pendekatan administrasi sosial berusaha mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menciptakan berbagai macam program guna meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, biasanya dengan penyediaan pelayanan sosial. Pendekatan ini dilakukan oleh pemerintah.
4. Pembangunan sosial  
Pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara utuh, di mana pembangunan ini dilakukan untuk melengkapi dinamika proses pembangunan ekonomi. (Fahrudin, 2014, p. 51)

Pendekatan kesejahteraan sosial terdiri dari filantropi sosial, pekerjaan sosial, administrasi sosial dan pembangunan sosial. Filantropi yang bersifat *charity* atau awal merupakan pendekatan yang pertama sebelum berkembang pada pendekatan yang lainnya. Setelah adanya filantropi sosial, muncul pendekatan kedua yaitu pekerjaan sosial yang lebih fokus pada penanganan masalah sosial. Administrasi sosial yang lebih dikenal dengan pemberian program atau pelayanan sosial dari pemerintah untuk masyarakat nya. Yang terakhir adalah pembangunan sosial yang erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial disini harus terencana karena bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## 2.2 Konsep Pekerjaan Sosial

Kesejahteraan sosial pada dasarnya memiliki tujuan utama yang dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami yakni berfokus untuk dapat mengembalikan keadaan keberfungsian sosial pada individu, kelompok, maupun masyarakat. Namun, untuk dapat mewujudkan hal tersebut tentunya sangatlah dibutuhkan bantuan dari tenaga professional yang dapat turut serta membantu dalam mewujudkan kondisi keberfungsian sosial tersebut. Tenaga professional yang dapat membantu menangani dan mewujudkan hal tersebut adalah seorang pekerja sosial.

Aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Zastrow (1999) dalam Suharto (2009: 1)

Profesi pekerjaan sosial dituntut harus professional karena adanya kode etik yang harus diikuti. Ketika seorang pekerja sosial tidak mengetahui bahkan tidak memahami mengenai kode etik maka tidak bisa dikatakan sebagai pekerja sosial professional. Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan yang profesional. Pekerjaan sosial sendiri memfokuskan kepada kegiatan pemberian pelayanan sosial agar individu, kelompok dan masyarakat mampu menjalankan keberfungsian sosialnya atau fungsi sosialnya dengan baik. Menurut *National Association of Social Workers* (NASW):

*Social work is the professional activity of helping individuals, groups or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Social work practice consist of the professional application of social work values, principles, and techniques to on or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counselling and psychoteraphy for individuals, families, and groups; helping communities or groups; helping communities or groups provide or improve social and health services; and participating in relevant legislative processes. The practice of social work requires knowledge of human development and behavior; of social, economic, and cultural intitutions; and of the interaction of all these factors. (Fahrudin, 2014, p. 60)*

Profesi pekerjaan sosial meningkatkan perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan-hubungan manusia serta pemberdayaan dan pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik tempat orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan dasar bagi pekerjaan sosial.

Pekerjaan sosial tidak lepas dari penerapan nilai, prinsip, dan tujuan yang mereka miliki. Pekerjaan sosial sendiri berfokus pada proses pertolongan yang dilakukan kepada individu, kelompok maupun masyarakat. Proses pertolongan ini diberikan kepada mereka yang memang memiliki disfungsi sosial atau keberfungsian sosial yang tidak berjalan dengan baik

Keberfungsian sosial dapat diartikan sebagai berjalan atau tidaknya peran seseorang di dalam masyarakat. Keberfungsian sosial merupakan resultant dari interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di masyarakat, seperti framework pendidikan, sistem keagamaan, sistem keluarga, sistem politik, sistem pelayanan sosial, dan seterusnya. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW adalah:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber pelayanan-pelayanan.
4. Menghubungkan dan memperbaiki kebijakan sosial. (Fahrudin, 2014, p. 66)

Pekerja sosial mempunyai tiga metode pokok dan tiga metode pembantu, yaitu: “(1) Metode Pokok: social case work, Social group work, dan Community Organization/Community Development. (2) Metode Pembantu: Social work administration, Social action, dan Social work research”. (Fahrudin, 2014, p. 71)

Metode-metode tersebut digunakan berdasarkan dan kebutuhan dari klien yang ditangani oleh para pekerja sosial. Semua tergantung kepada kasus atau masalah yang ada, sehingga penanganannya perlu disesuaikan sehingga dapat bisa ditangani dengan efektif dan efisien

### **2.2.1 Fokus Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial sebagai proses pertolongan memiliki banyak peranan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi selama pelaksanaan dari awal proses. Adapun peranan yang dimiliki pekerjaan sosial sebagai *fasilitator*, *mediator*, *broker*, pembimbing, perencana, pemecah masalah, dan *evaluator*. Peranan tersebut mengawal pekerja sosial menuju peningkatan keberfungsian sosial yang kinerjanya dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.
- b. Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau dan memperoleh berbagai sumber, pelayanan dan kesempatan.
- c. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas, dan berperikemanusiaan.
- d. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. (Suharto, 2011)

Pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya, tidak sama dengan profesi seperti psikologi, dokter, psikiater. Contohnya, ketika mengobati seorang pasien maka psikolog hanya berfokus pada kejiwaan pasiennya saja. Namun, berbeda dengan pekerja sosial yang ketika menghadapi klien, mereka tidak hanya melihat kepada target perubahan melainkan kepada lingkungan sosial di mana pasien berada, bagaimana orang-orang di sekelilingnya yang juga memiliki pengaruh yang besar kepada keadaan klien. Ruang pekerja sosial adalah menolong klien sebagai pelayanan sosial baik untuk individu, keluarga, kelompok, baik masyarakat yang membutuhkannya menggunakan nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan profesional pekerja sosial. Fokus utama dari pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial (fungsi sosial) melalui serangkaian proses yang memiliki tujuan dan strategi.

Keberfungsian sosial merupakan konsep yang memiliki substansi yaitu keterkaitan, hubungan, interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di masyarakat seperti sistem keagamaan, sistem pendidikan, sistem pelayanan sosial, sistem keluarga, sistem politik, dan lain-lain. Contohnya adalah kemampuan individu dalam menjalankan peran sosial adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya. Misalnya, seorang ibu memiliki peran sebagai pendidik, pengelola keuangan, pasangan suaminya. Oleh karena itu, seorang ibu dapat meminta izin fungsi tersebut. Namun disetujui ibu tidak dapat melakukan peranannya karena sakit, cacat, atau halangan lain maka ia dapat disetujui tidak menggunakan sosial atau disfungsi sosial.

### 2.2.2 Fungsi Pekerjaan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi- konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta mampu menciptakan kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*).  
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
- b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*).  
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi- kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini juga tercakup dengan fungsi pemulihan atau rehabilitasi.
- c. Fungsi Pengembangan (*Development*).  
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat
- d. Fungsi Penunjang (*Supportive*).  
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial yang lain. (Fahrudin, 2014)

Fungsi-fungsi pekerjaan sosial yaitu berfokus pada kebutuhan-kebutuhan dasar, standar-standar kesehatan dan kesejahteraan, status dan peranan dalam institusi sosial, ketertiban sosial, serta struktur institusional yang ada pada masyarakat demi tercapainya keberfungsian sosial.

### 2.2.3 Prinsip-prinsip Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai proses yang tentunya profesional, dalam ketentuannya memiliki prinsip-prinsip yang menaungi dan mengiringi dalam kelangsungannya. Ada enam prinsip dasar dalam praktek pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut :

1. Penerimaan  
Prinsip ini mengemukakan tentang pekerja sosial yang menerima klien tanpa “menghakimi” klien tersebut sebelum, pekerja sosial untuk menerima klien dengan sewajarnya (apa adanya) akan lebih membantu pengembangan relasi antara pekerja sosial dengan kliennya. Dengan adanya sikap menerima (menerima keadaan klien apa adanya) maka klien akan dapat lebih percaya diri dan dengan demikian ia (klien) dapat mengungkapkan berbagai macam perasaan dan kesulitan yang mengganjal di dalam pembicaraan.
2. Komunikasi  
Prinsip komunikasi ini dengan mudah dapat mendukung. Untuk komunikasi dengan klien, baik dalam bentuk komunikasi yang verbal, yang meminta klien melalui sistem

klien maupun bentuk komunikasi nonverbal, seperti cara membuka klien, memilih cara duduk, duduk dalam suatu pertemuan dengan anggota keluarga yang lain.

### 3. Individualisasi

Prinsip individualisasi pada intinya mempertimbangkan setiap individu yang berbeda satu sama lain sehingga seorang pekerja sosial haruslah mengatur cara memberi kliennya guna mendapatkan hasil yang diinginkan.

### 4. Partisipasi

Berdasarkan prinsip ini, seorang pekerja sosial harus meminta kliennya untuk mendorong aktif dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga klien dapat menggunakan sistem klien yang juga menyediakan rasa bantuan untuk bantuan tersebut. Karena tanpa ada kerja sama dan peran serta klien maka upaya bantuan sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal.

### 5. Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan ini akan memungkinkan klien atau sistem klien mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan dan bahaya yang ia hadapi dengan rasa aman, karena ia yakin apa yang ia utarakan dalam hubungan kerja dengan pekerja sosial akan tetap dijaga (dirahasiakan) oleh pekerja sosial agar tidak diketahui oleh orang lain (mereka yang tidak berkepentingan).

### 6. Kesadaran diri pekerja sosial

Prinsip kesadaran diri ini menuntut pekerja sosial untuk menjalin relasi profesional dengan menjalin relasi dengan kliennya, dalam arti pekerja sosial yang mampu menggerakkan benar-benar terhanyut oleh perasaan atau bantuan yang disampaikan oleh kliennya tidak “kaku” dalam percakapan dengan pekerja sosial, yang pesan informasi atau cara bicara, cara berbicara, dan lain-lain, bantuan dengan setiap tanggung jawab terhadap keberhasilan proses. (Fahrudin, 2014, pp. 16–19)

## 2.2.4 Tahapan-tahapan Intervensi Pekerjaan Sosial

Intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial akan melalui beberapa tahapan. Dalam pelaksanaannya, tahapan-tahapan ini disebut dengan tahapan intervensi pekerjaan sosial yang memudahkan pekerjaan sosial dalam melakukan praktiknya. Enam tahapan intervensi pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

### a. Tahap *engagement*, *intake* dan *contract*

Tahap ini adalah tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang akan diberikan oleh pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu klien memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien. Kontrak diartikan sebagai suatu kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien yang di dalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan-tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan-peranan dan harapan-harapan pekerja sosial dengan klien, metode-metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan-pengaturan lainnya.

### b. Tahap *Assessment*

*Assessment* merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah klien yang meliputi: bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor-faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah yang terdahulu yang pernah dilakukan klien, kondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan hal itu semua maka dapat ditentukan fokus atau akar masalah klien.

- c. Tahap Membuat Perencanaan Intervensi  
Rencana intervensi merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah tersebut.
- d. Tahap Melaksanakan Program Berdasarkan Rencana Intervensi  
Pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien. Dalam pemecahan masalah ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif pada setiap kegiatan.
- e. Tahap Evaluasi  
Pada tahap ini pekerja sosial harus mengevaluasi kembali semua kegiatan pertolongan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilannya, kegagalannya atau hambatan yang terjadi. Ada dua aspek yang harus dievaluasi oleh pekerja sosial yaitu tujuan hasil dan tujuan proses.
- f. Tahap Terminasi  
Tahap terminasi dilakukan bilamana tujuan prtolongan telah dicapai atau bilamana terjadi kegiatan referral atau bilamana karena alasan-alasan yang rasional klien meminta pengakhiran pertolongan atau karena adanya faktor-faktor eksternal yang dihadapi pekerja sosial atau karena klien lebih baik dialihkan ke lembaga-lembaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten. Pembagian kerja yang jelas akan mempermudah pelaksanaan pelayanan sosial sampai pada tujuan yang diharapkan. (Iskandar, 2013, p. 65)

Tahapan intervensi pekerjaan sosial di atas merupakan suatu tahapan-tahapan yang harus dipahami oleh seluruh pekerja sosial. Tahapan-tahapan ini bisa diterapkan pada individu, kelompok, dan masyarakat.

### 2.2.5 Peran-peran Pekerja Sosial

Peran pekerja sosial dalam menangani masalah mencakup masalah tiga level, yakni level mikro (individu), mezzo (keluarga dan kelompok kecil) dan makro (organisasi atau masyarakat). Pada masing-masing level peran pekerja sosial memiliki metode-metode yang berbeda-beda dalam penanganannya. Di level mikro dikenal sebagai *casework* (terapi perseorangan atau terapi klinis), di level mezzo ada beberapa metode *groupwork* (terapi kelompok) dan *family treatment* (terapi keluarga) dan pada level makro menggunakan metode *community improvement* (pengembangan masyarakat) atau *approach analisis* (analisis kebijakan). Peran yang dilakukan pekerja sosial dalam suatu masyarakat atau badan atau lembaga atau panti sosial akan beragam tergantung pada permasalahan yang dihadapinya. Peranan yang dilakukan oleh pekerja sosial antara lain:

1. Peranan sebagai Perantara (*Broker Roles*).  
Pekerja sosial menghubungkan antara anak asuh dengan sistem sumber baik batuan berupa materi ataupun non materi yang ada di suatu badan atau lembaga atau panti sosial baik panti asuhan, panti rehabilitasi dan lain-lainnya. Sebagai perantara pekerja sosial

juga harus berupaya untuk mencari suatu jaringan kerja dengan suatu organisasi atau perusahaan yang dapat membantu pelayanan yang dibutuhkan.

2. Peranan sebagai Pemungkin (*Enabler Roles*).  
Peranan ini merupakan peran pekerja sosial yang sering digunakan dalam profesinya karena peran ini menggunakan konsep pemberdayaan dan difokuskan pada kemampuan, keahlian, kapasitas, dan kompetensi anak asuh untuk menolong dirinya sendiri. Pada peranan ini pekerja sosial berperan sebagai konselor berusaha untuk memberikan peluang agar kebutuhan dan kepentingan anak asuh dapat terpenuhi dan terjamin, mengidentifikasi tujuan memfasilitasi untuk berkomunikasi, serta memberikan peluang untuk pemecahan masalah yang dihadapi anak asuh. Anak asuh melakukan semaksimal mungkin kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya agar dapat bermanfaat dan dapat mengatasi permasalahannya.
3. Peranan sebagai Penghubung (*Mediator Role*).  
Peran pekerja sosial sebagai penghubung (*mediator role*) adalah bertindak untuk mencari kesepakatan, sebagai penengah dalam perbedaan, konflik antar anak asuh dengan keluarga, konflik antar anak asuh yang satu dengan yang lain, untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dan memperoleh hak-hak yang semestinya.
4. Peranan sebagai Advokasi (*Advocator Role*).  
Peran yang dilakukan oleh pekerja sosial disini berbeda dengan advokat hukum. Advokat hukum dituntun melalui keinginan hukum sesuai dengan hukum pada suatu negara, sedangkan untuk advokat pekerja sosial dibatasi oleh kepentingan yang timbul dari anak asuh atau penerima pelayanan.
5. Peranan sebagai Perunding (*Conferee Role*).  
Peranan yang diasumsikan ketika pekerja sosial dan anak asuh atau penerima layanan mulai bekerja sama. Peran pekerja sosial ini dilakukan ketika pencarian data, pemberian gambaran pada korban.
6. Peranan Pelindung (*Guardian Role*).  
Peran pekerja sosial sebagai pelindung (*Guardian Role*) seringkali dilakukan oleh bidang aparat, akan tetapi pekerja sosial dapat berperan melindungi anak asuh atau penerima pelayanan, juga orang-orang yang beresiko tinggi terhadap kehidupan sosialnya.
7. Peranan sebagai Fasilitasi (*Fasilitator Role*).  
Seorang fasilitator pekerja sosial harus memberikan pelayanan yang bervariasi dalam memberikan pelayanannya tergantung pada kebutuhan serta masalah yang dihadapi anak asuh hal ini bertujuan agar anak asuh tidak merasa tertekan dan jenuh dengan pelayanan yang diberikan apabila pelayanan tersebut bervariasi dan menarik bagi anak asuh. Di samping itu, peran ini sangat penting untuk membantu meningkatkan keberfungsian anak asuh khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu dalam pemecahan masalah yang dihadapi anak asuh.
8. Peranan sebagai Inisiator (*Inisiator Role*).  
Peranan yang memberikan perhatian pada masalah atau hal-hal yang berpotensi untuk menjadi masalah.
9. Peranan sebagai Negosiator (*Negotiator Role*).  
Peran ini dilakukan terhadap anak asuh yang mengalami konflik atau permasalahan dan mencari penyelesaiannya dengan kompromi dengan persetujuan dan kesepakatan bersama anatar kedua belah pihak. Posisi seorang negosiator berbeda dengan mediator yang posisinya netral. Seorang negosiator berada pada salah satu posisi yang sedang memiliki konflik. (Suharto, 2014, p. 155)

### 2.3 Tinjauan Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam segala bidang kehidupan yang berorientasi kepada masyarakat dan masalah-masalah sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Konsep kesejahteraan adalah dimana kebutuhan dasar tersebut tidak hanya terdiri dari kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, tetapi pendidikan dan kesehatan juga merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus di penuhi sehingga manusia dapat berada dalam keadaan sejahtera di dalam kehidupannya. Konsep kesejahteraan sosial yaitu:

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat. (Fahrudin, 2014, p. 9)

Definisi di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir dalam suatu lembaga dan pelayanan sosial sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan cara meningkatkan kemampuan individu dan kelompok baik dalam memecahkan masalahnya maupun dalam memenuhi kebutuhannya.

Pekerjaan sosial suatu profesi pelayanan kepada manusia (individu, kelompok, dan masyarakat) dalam memberikan pelayanan profesionalnya, pekerja sosial dilandasi oleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan ilmiah. Konsep pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional membantu individu, siswa, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan dan memulihkan kemampuan keberfungsian sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini. (Fahrudin, 2014, p. 60)

Pekerja sosial adalah suatu profesi yang dimana profesi ini bertujuan untuk memberikan pertolongan dan pelayanan bagi masyarakat secara professional dalam konsep kesejahteraan sosial. Seorang pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam mengembalikan keberfungsian sosialnya menggunakan beberapa metode yang digunakan sesuai dengan masalah yang dialami oleh klien.

Definisi di atas menunjukkan bahwa pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang dilandasi dengan keprofesionalan, tujuannya untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam memperbaiki keberfungsian sosial mereka.

Manusia dapat memenuhi kehidupannya baik secara pangan, papan, dan sandang jika keberfungsian sosial manusia itu berjalan sebagaimana mestinya. Keberfungsian sosial dalam profesi pekerjaan sosial merupakan konsep penting yang merupakan pembeda dengan profesi lainnya. Keberfungsian sosial adalah sebagai berikut:

Keberfungsian sosial adalah kemampuan orang untuk menangani tugas-tugas dan aktivitasnya yang penting dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan melaksanakan peranan sosial utamanya sebagaimana yang diharapkan oleh kebudayaan dari suatu komunitas khusus. (Fahrudin, 2014, p. 43)

Definisi di atas menunjukkan bahwa keberfungsian sosial adalah kemampuan seseorang dalam melakukan peran untuk menangani tugas dan aktivitasnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka keberfungsian sosialnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dari persoalan tersebut, akan muncul masalah sosial. Kebutuhan dasar seseorang harus dapat dipenuhi dengan baik jika tidak maka seseorang itu akan mengalami krisis. Dari situlah masalah sosial bisa muncul dan jika terus-menerus tidak diatasi maka masalah sosial akan terus bertambah banyak.

Masalah sosial berkaitan dengan ukuran tentang nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat tentu saja memiliki ukuran tentang nilai dan norma sendiri-sendiri yang berbeda dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang lain. Nilai-nilai dan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat akan dijadikan sebagai penuntun atau pedoman dalam kehidupannya. Masalah sosial adalah sebagai berikut:

Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat, fenomena tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau kondisi yang tidak dikehendaki, oleh karenanya wajar kalau kemudian selalu mendorong adanya usaha untuk mengubah dan memperbaikinya. (Soetomo, 2013, p. 28)

Definisi di atas menunjukkan bahwa masalah sosial sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jika masalah sosial tidak dapat diatasi dengan baik maka masalah sosial akan semakin parah dan mengakibatkan kondisi menjadi buruk. Dampak dari masalah sosial bukan

hanya kepada beberapa kalangan, tetapi semua kalangan bisa merasakan dampak dari masalah sosial tersebut.

## 2.4 Konsep Partisipasi

Partisipasi merupakan keikutsertaan warga masyarakat atau individu dalam suatu kegiatan atau program yang di laksanakan di suatu wilayah tempat mereka berada. Selain itu partisipasi juga merupakan keikutsertaan warga masyarakat atau individu dalam suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan disuatu wilayah tempat mereka berada. Adapun pengertian partisipasi menurut Mardikanto dan Soebiato (2017 )adalah: “Partisipasi adalah bentuk keterlibatandan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam proses kegiatanberlangsung”.

Pengertian partisipasi menurut definisi di atas adalah keterlibatan seseorang atau kelompok secara sadar kedalam interaksi sosial secara aktif pada suatu situasi tertentu karena alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Dengan pengertian itu, seseorang bias berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok memahami suatu hal dalam pemikirannya melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan,kepatuhan dan tanggung jawab bersama. Selain itu, partisipasi menurut Ndraha (1987:1) dikutip oleh Huraerah (2011)menyebutkan bahwa pasrtisipasi adalah:

- a. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain (*contract change*) sebagai satu diantara titik awal perubahan sosial.
- b. Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberi tanggapan informasi, baik dalam arti menerima (menaati, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya).
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan perencanaan).
- d. Partisipasi dalam operasional pembangunan.
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan (*participation in benefit*).
- f. Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan.

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi dimulai dengan melakukan kontak dengan pihak lain, memperhatikan atau menyerap serta memberi tanggapan

informasi dan menerimanya. Partisipasi juga bisa dilakukan dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan. Selain itu, partisipasi juga diartikan sebagai menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan. Menurut Beal (1964) dalam Mardikanto dan Soebiato (2017:80) definisi partisipasi adalah: “Partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau tumbuh karena adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang oksogen (*exogenous change*).”

Dari penjelasan di atas tentang partisipasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi sebagai sebuah proses yang melahirkan jaringan sosial baru, lalu berusaha agar dapat melaksanakan tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diharapkan oleh masyarakat atau struktur sosial yang terlibat.

#### 2.4.1 Bentuk Partisipasi

Menurut Sulaiman (1985) yang dikutip oleh Huraerah (2011) menjelaskan bahwa bentuk partisipasi sosial adalah dibagi menjadi lima macam, yaitu:

- a. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama fisik dan tatap muka.
- b. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana, dan sarana. Sebaiknya datang dari dalam masyarakatnya sendiri. Kalaupun terpaksa diperlukan dari luar, hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
- c. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
- d. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

- e. Partisipasi resrepresentatif dengan memberika kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia

Berdasarkan definisi di atas bahwa bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan. Sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi resrepresentatif.

Menurut pendapat Hamijoyo dan Iskandar dalam Huraerah (2011) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jenis partisipasi ialah macamnya sumbangan yang diberikan orang atau kelompok yang berpartisipasi. Sumbangan dalam berpartisipasi dapat dirinci jenis-jenisnya sebagai berikut:

1. Partisipasi Buah Pikiran, yang diberikan partisipan dalam panjang sono, pendapat, pertemuan atau rapat.
2. Partisipasi Tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
3. Partisipasi Harta Benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan kegiatan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
4. Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industry.
5. Partisipasi Sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, melayat (dalam peristiwa kematian), kondangan, nyambungan dan mulang-sambung.

#### 2.4.2 Faktor-fakror dalam partisipasi

Partisipasi yang timbul dalam setiap individu tentunya terjadi dikarenakan adanya suatu persepsi atau pemikiran yang ada dalam dirinya. Terdapat faktor- faktor dalam partisipasi. Menurut Sahidu (dalam Fahrudin, 2012) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah:

- a. Motif harapan
- b. Needs
- c. Rewards, dan
- d. Penguasaan informasi.

Faktor yang memberikan kesempatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi adalah:

- a. Pengaturan dan pelayanan
- b. Kelembagaan
- c. Struktur dan stratifikasi sosial
- d. Budaya local
- e. Kepemimpinan
- f. Sarana dan prasarana

Sedangkan untuk faktor yang mendorongnya adalah:

- a. Pendidikan modal, dan
- b. Pengalaman yang dimiliki

Di lihat dari penjelasan di atas bahwa faktor-faktor partisipasi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor tersebut terjadi karena adanya sebuah harapan dan keinginan dari setiap individu atau orang untuk berubah dan menghasilkan tujuan yang diinginkan, kemudian faktor tuntutan juga merupakan suatu hal yang menyebabkan seseorang untuk dapat berpartisipasi dan juga didukung oleh adanya *rewards* yang akan didapatkan.

#### 2.4.3 Manfaat Partisipasi

Pengertian mengenai partisipasi yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi merupakan suatu keterlibatan terhadap suatu kegiatan ataupun yang diharapkan oleh masyarakat agar dapat bermanfaat dalam interaksi sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Selain itu partisipasi memiliki beberapa bentuk yakni: partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi keterampilan dan kemahiran, dan juga partisipasi sosial.

Bentuk partisipasi ini tentunya dapat memiliki manfaat sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat. Menurut Suratmo (1992) yang dikutip oleh Fahrudin Adi (2012) menyebutkan bahwa manfaat dari partisipasi sosial yang dirasakan oleh masyarakat dibagi menjadi tujuh:

1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan di daerahnya, sehingga dapat mengetahui dampak apa yang akan terjadi baik yang positif maupun yang negative, dan cara yang menanggulangi dampak negative yang akan harus dilakukan.
2. Masyarakat akan ditingkatkan pengetahuannya mengenai masalah lingkungan, pembangunan, dan hubungannya, sehingga pemerintah dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Masyarakat dapat menyampaikan informasi dan pendapatnya atau persepsinya kepada pemerintah terutama masyarakat ditempat proyek yang terkena dampak.
4. Pemerintah mendapatkan informasi-informasi dari masyarakatnya yang belum atau tidak ada dalam lampiran amdal, sehingga kebijaksanaan atau keputusan yang akan diambil akan lebih tepat, karena dalam informasi tersebut sering pemerintah dapat menemukan masalah-masalah yang penting bagi masyarakat yang belum terekam dalam laporan amdal secara jelas terutama hal-hal yang tidak dapat dikuantitatifkan.
5. Apabila masyarakat telah mengetahui cukup banyak mengenai proyek tersebut termasuk dampak apa saja yang akan terjadi (positif dan negative) dan usaha-usaha apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi dampak negative, sedang dari pihak pemerintah dan pemrakarsa proyek mengetahui pendapat-pendapat masyarakat serta keinginannya atau hal-hal apa yang perlu dilakukan, sehingga salah atau terjadinya konflik dapat dihindari.
6. Masyarakat akan dapat menyiapkan diri untuk menerima manfaat yang akan dapat dinikmati dan apabila mungkin meningkatkan manfaat tersebut (dampak positif) dan ikut menekan atau menghindarkan diri terkena dampak negative.
7. Dengan ikut aktifnya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sejak tahap penyusunan amdal, biasanya perhatian dan instansi pemerintah yang bertanggungjawab dan pemrakarsa proyek pada masyarakat akan meningkat.

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa partisipasi mempunyai manfaat yang cukup banyak khususnya untuk masyarakat sendiri yang ikut terlibat dalam

partisipasi. Manfaat yang dapat diterima atau dirasakan oleh masyarakat diantaranya masyarakat bisa mendapatkan informasi, pengetahuan dan masyarakat juga dapat menyampaikan informasi dan pendapatnya atau persepsinya mengenai rencana pembangunan, sehingga dapat mengetahui dampak positif dan negative yang akan dirasakan.

## **2.5 Konsep Kesehatan**

Kesehatan masyarakat ialah sebagai ilmu dan seni dalam mencegah penyakit, memperpanjang hidup dan meningkatkan kualitas hidup dengan melakukan upaya yang terorganisasi dan memberi pilihan informasi kepada masyarakat atau organisasi. Adapun definisi kesehatan masyarakat ialah sebagai berikut:

Ilmu dan seni mencegah penyakit dan memperpanjang hidup serta meningkatkan kesehatan fisik dan mental, melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol lingkungan di masyarakat, Pendidikan individu tentang kebersihan perorangan dan pengorganisasian pelayanan media untuk pencegahan penyakit dan pengembangan aspek social agar setiap orang mempunyai standar kehidupan yang kuat (Winslow, 1920).

Kesehatan yang dimiliki setiap manusia harus selalu dijaga oleh diri sendiri bukan oleh orang lain. Karena kesehatan dari setiap orang merupakan tanggung jawab setiap manusia itu sendiri. Kesehatan yang dimaksud disini terkait dengan

lingkungan masyarakat berarti dalam hal ini perlu adanya kerja sama dengan masyarakat agar lingkungan tetap terjaga dengan baik sehingga menghasilkan lingkungan yang sehat.

Sanitasi merupakan suatu upaya yang mewujudkan kondisi lingkungan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Penyediaan minum air bersih dan pembuangan limbah yang memadai termasuk sanitasi. Dimana hal tersebut merupakan bagian terpenting di dalam bagian masyarakat. Definisi sanitasi adalah sebagai berikut:

Sanitasi adalah perilaku pembudayaan hidup bersih secara sengaja dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan usaha akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia (Azawar, 1990;8).

Definisi di atas menjelaskan mengenai lingkungan yang layak atau lingkungan yang bersih yang sesuai untuk menjalankan kehidupan. Kehidupan bermasyarakat akan terasa nyaman jika sanitasi lingkungan yang ada terjaga dan juga bersih sehingga masyarakat akan terjamin kesehatannya. Suatu usaha yang mengawasi beberapa factor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek, merusak perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup (*World Health Organization (WHO)* dalam (Yulia, 2006;4).

Maka dengan Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam PHBS melalui Program Sanitasi Total berbasis Masyarakat STBM ialah bertujuan untuk masyarakat dalam menumbuhkan rasa menjaga kesehatan lingkungan sekitarnya khususnya di Desa Lebakwangi. Tentunya untuk mencapai kesejahteraan social dengan kesehatan

lingkungan yang dimulai dari program STBM di Desa Lebakwangi Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

## **2.6 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat**

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemukiman. Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Permenkes RI No. 3 Tahun 2014). Penyelenggaraan STBM dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. STBM terdiri dari 5 pilar yaitu :

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop-BABS)

Stop buang air besar sembarangan adalah kondisi setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menularkan penyakit. Perilaku Stop-BABS diikuti dengan pemanfaatan sarana sanitasi yang saniter berupa jamban sehat.

2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

Cuci tangan pakai sabun adalah perilaku cuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun. Sarana CTPS harus memiliki kriteria utama yaitu air bersih yang dapat dialirkan, sabun dan penampungan atau saluran air limbah yang aman.

3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT)

Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.

#### 4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PS-RT)

Pengamanan sampah rumah tangga adalah melakukan kegiatan pengelolaan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang. Tujuan dari pengamanan sampah rumah tangga yaitu untuk menghindari penyimpanan sampah rumah tangga dengan segera menangani sampah.

#### 5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT)

Pengamanan limbah cair rumah tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit. Proses pengamanan limbah cair yang aman pada tingkat rumah tangga.

### **2.8 Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)**

PHBS merupakan singkatan dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. PHBS merupakan perilaku kesehatan yang dilakukan atas dasar kesadaran pribadi

sehingga keluarga beserta anggotanya mampu menolong diri sendiri serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan sebuah upaya untuk menularkan perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok, maupun masyarakat dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Perilaku Hidup bersih dan Sehat bertujuan untuk menjadikan anggota masyarakat sebagai agen perubahan agar mampu meningkatkan kualitas perilaku hidup bersih dan sehat.

PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat (Kementrian Kesehatan RI, 2011). Definisi lain menyebutkan bahwa PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat memiliki banyak manfaat untuk kehidupan setiap masyarakat. Manfaat utama PHBS adalah terciptanya masyarakat yang sadar akan kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan serta kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan.

Indikator diperlukan untuk menilai apakah aktivitas pokok yang dijalankan telah sesuai dengan rencana dan menghasilkan dampak yang diharapkan (Depkes

RI 2002 : 21, dalam Muliawan 2008). Indikator merupakan suatu alat ukur menunjukkan suatu keadaan atau kecenderungan keadaan dari suatu hal yang menjadi pokok perhatian (Kementrian Kesehatan RI, 2011). Indikator dalam PHBS merupakan salah satu bentuk upaya dari pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak. Segala bentuk indikator tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk hidup dan perilaku yang lebih baik.